

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terorisme telah menjadi ancaman multidimensi terhadap keamanan global selama berabad-abad, meskipun bentuk dan skalanya terus berevolusi seiring dinamika geopolitik, teknologi, dan ideologi (Budi et al., 2025). Terorisme mulai dikenal sejak tragedi serangan 11 September 2001 yang dilakukan oleh kelompok ekstremis yaitu Al Qaeda, tepatnya pada saat penyerangan gedung World Trade Centre di Amerika Serikat (Ningsi, 2025; Budi et al., 2025). Terorisme dalam perkembangannya, telah menciptakan organisasi dan membentuk jaringan global di mana kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di berbagai negara terintegrasi ke dalam suatu jaringan terorisme internasional. Mereka juga memiliki hubungan dan mekanisme kolaborasi satu sama lain, baik dalam aspek operasional maupun dalam infrastruktur pendukung (Fisabillah et al., 2019). Fenomena tersebut menjelaskan bahwa jaringan tersebut berkembang menjadi jaringan yang terhubung dengan berbagai wilayah dan tidak hanya bersifat ideologis tetapi juga operasional sehingga memperkuat koordinasi antar wilayah internasional.

Seiring dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi saat ini, kejahatan telah bertransformasi dari bentuk secara umum menjadi kejahatan yang menggunakan internet sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang memanfaatkan internet adalah terorisme, yang menjadi sarana bagi kelompok ekstremis untuk melakukan propaganda, merekrut anggota dan penyebaran ideologi yang pengaruhnya secara global (Rozika, 2017). Kelompok terorisme berbasis agama memiliki kemampuan lebih besar dan mudah untuk bergerak melintasi batas negara, seperti menyebarkan ideologi mereka, serta merencanakan serangan lintas negara (Sitanggang, 2024). Setelah serangan 9/11, Al-Qaeda berhasil memperluas jangkauan gerakan terorisme yang sebelumnya

hanya beroperasi di tingkat nasional, menjadi pergerakan transnasional yang tidak lagi terbatas oleh satu negara (Suhito, 2017).

Al-Qaeda mulai mengalihkan fokusnya dari jihad di dalam negeri ke jihad di luar negeri yang menargetkan kepentingannya terhadap negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Perubahan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan pemerintahan muslim masih bertahan karena adanya dukungan dari negara-negara Barat. Serangan yang dilakukan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Afrika Timur pada tahun 1998, USS Cole pada tahun 2000, dan yang terpenting serangan pada 11 September 2001, merupakan titik balik bagi Al-Qaeda untuk memperluas jaringan terorismenya (Gunaratna, 2017). Lebih lanjut, dalam artikel jurnal oleh Gunaratna (2017) menjelaskan bahwa Al Qaeda menjadi entitas yang beroperasi dalam kondisi cair, bergerak, dan lintas batas negara. Kondisi ini mengharuskan Al Qaeda untuk mengembangkan struktur jaringan yang lebih fleksibel, terdesentralisasi, dan tersebar.

Perkembangan ISIS sebagai organisasi teroris transnasional tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik Timur Tengah pasca-invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Kevakuman kekuasaan yang ditinggalkan pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok militan untuk memperluas pengaruh mereka. Abu Musab al-Zarqawi, yang kemudian menjadi salah satu pendiri Al-Qaeda in Iraq (AQI), mengisi celah tersebut dengan membangun jaringan yang kelak berevolusi menjadi ISIS (Gunaratna, 2017). Perubahan ideologi dari AQI menjadi ISIS mengubah wajah terorisme global secara drastis. Kelompok yang awalnya hanya fokus pada wilayah lokal saja kini beralih menjadi entitas negara, yang secara sepihak mengklaim kepemimpinan atas seluruh umat Muslim di dunia.

ISIS dipandang sebagai transformasi dari Al-Qaeda yang lebih radikal. ISIS merupakan sebuah negara yang dideklarasikan secara tidak resmi oleh pemimpinnya yaitu Abu Bakar Albaghdadi pada 9 April 2013. ISIS berupaya untuk memperluas wilayah dan mempertahankan kemandirian ekonomi mereka dengan cara-cara kekerasan seperti penjarahan barang-barang milik swasta dan perampokan Bank (Rizandi, 2016). Kemajuan teknologi dan informasi menjadi kunci intensif bagi ISIS untuk bertransformasi setelah kehilangan wilayahnya. ISIS

mengalihkan sumber dayanya untuk memperluas propaganda digital melalui berbagai *platform* media sosial dan aplikasi tersandi, salah satunya telegram yang memungkinkan adanya penyampaian propaganda secara masif. Hal ini digunakan untuk menyebarkan ideologi, merekrut anggota, menggalang dana, memberikan instruksi operasional, dan menginspirasi serangan (Aidil, 2025).

Kemunculan *Islamic States in Iraq and Suriah* (ISIS) mendapat sorotan tajam dunia internasional, karena dalam waktu singkat memperoleh jejaring yang cukup luas serta pola-pola gerakan radikal yang dianggap mengancam keamanan individu dan negara. Berbeda dengan aksi teror ekstremis muslim lainnya, kehadiran ISIS membawa dampak pada terciptanya instabilitas keamanan di tingkat global, kawasan, dan nasional (Rahmanillah, 2020). Pada tahun 2015, ISIS melakukan sebanyak 80 serangan teror yang menjadikannya kelompok terorisme paling aktif saat itu. Serangan teror secara keseluruhan di 2015 oleh aksi penembakan (111 kasus), diikuti bom bunuh diri (88 kasus), bom biasa (45 kasus), serta bom mobil (24 kasus) (Asghar, 2016).

Kelompok-kelompok lokal yang berafiliasi dengan ISIS kini beroperasi berdasarkan inspirasi ideologis daring bukan dari perintah langsung. Hal ini telah menimbulkan fenomena ancaman oleh serangan *lone-actor* (pelaku tunggal) atau sel-sel kecil. Meskipun skala kerusakannya relatif lebih kecil, namun ancaman ini lebih sulit dideteksi karena kurangnya jejak komunikasi dan perencanaan yang tertutup. Pelaku seringkali tidak terdeteksi karena minimnya komunikasi dan perencanaan tertutup mereka (Heltaji, 2021). Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi efektivitas keamanan tradisional yang dirancang untuk ancaman hierarkis, karena sifatnya yang tersembunyi dan tidak terduga. Kehadiran *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dan keluarganya berpotensi memberikan kontribusi bagi rekrutmen anggota baru, regenerasi sel teroris, transfer pengetahuan, dan memimpin serangan baru (Aidil, 2025).

Perempuan selalu berada dalam posisi sebagai korban manakala suatu masyarakat mengalami proses radikalisasi. Perempuan dalam agama apapun selalu menjadi sasaran diskriminasi dan eksploitasi bagi para penafsir fundamental yang mempunyai pandangan misogini terhadap perempuan. Diskriminasi dalam penafsiran, menurut Karen Armstrong dalam Mulia (2021), dimulai ketika sejarah agama dipisahkan dari konteks historis keyakinan individu pemeluknya. Kelompok

teroris seperti ISIS, Boko Haram, dan Al-Qaeda secara aktif berupaya merekrut perempuan dengan memanfaatkan potensi mereka untuk menghindari langkah-langkah keamanan dan mengakses target yang mungkin sulit dijangkau oleh anggota laki-laki. Kelompok ekstremis telah memanfaatkan perempuan dengan berbagai peran, seperti pelaku bom bunuh diri, pembunuh bayaran, dan penegak doktrin mereka. Dalam beberapa kasus, mereka juga mengambil peran penting dalam upaya radikalisi, menggunakan *platform* daring untuk menyebarkan propaganda ekstremis dan merekrut anggota baru (Ningsi, 2025).

Selama ini, perempuan selalu dianggap sebagai makhluk yang mempunyai kelembutan. Namun, pandangan tersebut seketika lenyap ketika mereka terlibat dalam aksi brutal terorisme. Dalam risetnya, *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) membagi peran perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia, yaitu sebagai pengelola forum percakapan daring, mengumpulkan dana, merekrut anggota dan menjadi tandem pasangan pelaku peledakan bom. Menurut UNODC (Dewi et al., 2025) peran perempuan dalam terorisme terbagi dalam beberapa kategori peran yaitu: perempuan sebagai pemimpin, perempuan sebagai *female suicide bomber*, perempuan sebagai perekrut, perempuan sebagai agen, dan perempuan sebagai militan. Marcoes menjelaskan bahwa bergabungnya perempuan dengan kelompok teroris merupakan bentuk kesadaran mereka akan isu-isu ketidakadilan, ketidaksetaraan dan kekecewaan atas kesenjangan ekonomi. Mereka percaya bahwa semua kegelisahan mereka dapat diselesaikan dengan jalan kekerasan yaitu dengan aksi terorisme (Faishal, 2016).

Perempuan dalam ISIS sebenarnya adalah bentuk strategi bertahan hidup ISIS di tengah tekanan yang ada. Pasca runtuhnya wilayah kekuasaan fisik mereka di Irak dan Suriah sekitar tahun 2017–2019, ISIS mengalihkan fokus ke ruang digital untuk menjangkau demografi yang lebih luas, termasuk kaum perempuan global. Konsep inilah yang memicu lahirnya istilah "feminisasi terorisme". Di sini, posisi perempuan bergeser drastis dari yang tadinya hanya peran pendukung di belakang layar, kini mereka ditempatkan sebagai penggerak strategis dalam sistem organisasi mereka (Spencer, 2016; Raghavan & Balasubramaniyan, 2014).

Selain itu, perempuan bertugas sebagai kombatan garis depan dalam pertempuran seperti di Mosul 2017, menjadi penembak jitu khusus, serta mengisi posisi pelaku bom bunuh diri untuk menggantikan korban laki-laki yang berkurang

(Eurasianet, 2018). Mereka juga mengoordinasikan pengumpulan dana rahasia di Pakistan, menyelewengkan senjata melalui penyelundupan, merekrut anggota baru melalui media sosial dengan narasi persaudaraan, serta bertindak sebagai mata-mata yang memanfaatkan kelemahan aparat terhadap perempuan (Mae & Smith, 2015).

Banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai keterlibatan perempuan dalam terorisme yang umumnya menempatkan perempuan dalam posisi pasif sebagai korban, objek radikalisi, atau korban dari kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh kelompok ekstremis. Pendekatan seperti ini banyak ditemukan dalam kajian awal tentang terorisme, yang lebih menyoroti dimensi kerentanan perempuan akibat dominasi patriarki dalam konteks sosial maupun keagamaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lensa agensi dalam feminisme yang memandang bahwasanya perempuan tidak hanya sekedar menjadi korban yang lemah, melainkan telah bertransformasi menjadi aktor aktif teroris itu sendiri.

Meskipun terdapat data empiris yang signifikan mengenai keterlibatan perempuan dalam jaringan ISIS, yakni mencakup 13% dari total pejuang asing (*foreign terrorist fighters*), analisis terhadap agensi aktif mereka masih sangat terbatas. Sejauh ini studi terdahulu cenderung menempatkan perempuan dalam posisi pasif sebagai korban manipulasi informasi, objek radikalisi, atau sekadar pengikut suami. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat dinamika bagaimana interksi perempuan dalam konteks jaringan terorisme ISIS. Selain itu menganalisis faktor-faktor pendorong keterlibatan perempuan sebagai agensi dalam jaringan tersebut. Selain itu penelitian ini akan menjelaskan kontribusi agensi perempuan terhadap aktivitas jaringan transnasional ISIS.

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam mengisi celah literatur mengenai terorisme berbasis perspektif gender yang selama ini sering mengabaikan dimensi agensi aktif perempuan. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan perspektif dalam menjelaskan mengapa perempuan secara sadar memilih berpartisipasi dalam gerakan ekstremis. Secara praktis penelitian ini memberikan kesadaran bagi masyarakat mengenai kompleksitas peran perempuan dalam jaringan global, sehingga upaya deradikalisasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan menyoroti akar motivasi yang spesifik pada perempuan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah, peneliti merumuskan pertanyaan: **“Bagaimana agensi membentuk keterlibatan perempuan dalam jaringan teroris Transnasional ISIS?”**.

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah wilayah yang menjadi pusat aktivitas ISIS di Timur Tengah, khususnya, Suriah dan Irak. Selain itu Indonesia dipilih untuk menunjukkan jaringan transnasional dan operasi ISIS di negara lain, terutama di wilayah Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Penelitian ini fokus pada aspek agensi perempuan dalam terorisme, yaitu bagaimana perempuan mengambil keputusan dan menunjukkan kemampuan bertindak dalam konteks ekstrem. Penelitian ini memfokuskan pada periode 2020-2025, di mana periode tersebut mencerminkan perkembangan propaganda jaringan teroris ISIS. Penelitian ini juga menyoroti keterlibatan perempuan sebagai agensi dalam aksi teror tersebut.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian dijabarkan menjadi beberapa pernyataan penelitian sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dinamika interaksi perempuan dalam konteks jaringan terorisme ISIS.
2. Menganalisis faktor-faktor pendorong keterlibatan yang menunjukkan adanya keterlibatan perempuan sebagai agensi dalam Jaringan Teroris Transnasional ISIS.
3. Menjelaskan kontribusi agensi perempuan terhadap aktivitas jaringan teroris transnasional ISIS.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini maka kegunaan penelitian dijabarkan menjadi beberapa kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menempatkan

perempuan sebagai subjek yang memiliki agensi (kemauan sadar), bukan sekadar objek atau korban pasif dalam jaringan terorisme.

2. Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan aparat keamanan dalam merumuskan strategi penanganan terorisme yang mempertimbangkan peran gender.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan akademisi mengenai kompleksitas peran perempuan dalam jaringan teroris serta mengurangi stereotip yang ada.

1.5 Kerangka Teoritis – Konseptual

1.5.1 Agensi dalam Feminisme

Feminisme yaitu sebuah keyakinan yang menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, harus memiliki hak dan kesempatan yang sama, kesetaraan untuk semua orang, tanpa memandang identitas gender, seksualitas, ras, kelas, atau etnis (UN Women, 2026). Feminisme juga di definisikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak antara kaum wanita dan pria karena adanya ketidakadilan yang sistematis bagi perempuan di seluruh dunia (Bendar, 2019; Aizid, 2024). Pendekatan feminisme pertama dalam konteks hubungan internasional muncul dengan aliran yang disebut feminisme liberal, yang merupakan suatu pandangan yang mempercayai tentang adanya peranan yang diwakilkan perempuan pada dunia politik, dan pendekatan ini pada dasarnya bersifat mempertanyakan kembali mengapa wanita memiliki batasan-batasan di dunia (Subandi, 2021).

Dalam feminisme, agensi tidak terlepas dari peranan sosiolog yang telah berjuang untuk mengkolaborasikan peran struktur sosial dan pengaruh budaya tentang bagaimana peran agensi dalam pembentukan identitas dan bagaimana agensi memahami tindakan-tindakan sebagai struktur sosial. Agensi dalam feminisme dapat juga diartikan sebagai momen ketika perempuan berhasil mengekspresikan diri di luar sistem ekspresi laki-laki dominan adalah bentuk pembebasan linguistik dan simbolik (Indra, 2025). Dalam pemikiran feminisme barat, agensi perempuan cenderung selalu diartikan sebagai kapasitas perempuan dalam menyadari pentingnya melawan hal-hal yang menjadi penghambat bagi

mereka (Anotasi, 2018). Teori agensi (*agency theory*) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan principal-agent. Dengan kurangnya literasi yang baik perempuan mudah terpropaganda khususnya di media maya. Ada empat faktor yang mendorong perempuan terlibat aksi radikalisme dan terorisme, seperti faktor agama, faktor ideologis, faktor pribadi, dan faktor politik (Kurniawati, 2022). Menurut Madhok., et al (2013) agensi merupakan salah satu konsep paling penting dalam teori feminis, terutama dalam kaitannya dengan gender, budaya, dan kekuasaan. Mereka mengkritik kecenderungan yang merepresentasikan perempuan secara dua kutub ekstrem, yaitu sebagai korban pasif patriarki atau sebagai subjek yang sepenuhnya otonom dan bebas memilih (Madhok, 2013).

Agensi perempuan diasosiasikan dengan kebebasan, kreativitas, dan potensi perubahan melalui tindakan agen bebas, termasuk dalam diskusi mengenai dominasi laki-laki di ruang domestik dan publik. Prinsip dasarnya mencakup kesetaraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan kemandirian, yang memungkinkan perempuan memiliki otonomi meski menghadapi patriarki. Saba Mahmood mengkritik feminisme liberal yang sering membatasi agensi perempuan pada perlawanan terhadap adat atau tradisi, dengan menyoroiti keragaman pengalaman hidup perempuan.

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan pendekatan feminisme liberal yang dimana pendekatan ini memaknai agensi perempuan semata-mata sebagai kebebasan dari norma, tradisi, atau struktur patriarki. Pendekatan feminisme liberal cenderung melihat perempuan sebagai agen hanya ketika mereka melakukan perlawanan terhadap tatanan sosial yang menindas. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan perspektif feminisme non-liberal sebagaimana dikemukakan oleh Mahmood (2006) yang memandang agensi sebagai kapasitas bertindak yang dapat muncul melalui kepatuhan, disiplin diri, dan internalisasi norma ideologis maupun religius tertentu. Agensi perempuan tidak selalu termanifestasi dalam bentuk resistensi terhadap patriarki, melainkan dapat hadir dalam bentuk penerimaan sadar dan partisipasi aktif di dalam struktur yang ada.

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap keterlibatan perempuan dalam organisasi ekstrem seperti ISIS, di mana tindakan perempuan tidak dapat secara sederhana dikategorikan sebagai hasil paksaan atau manipulasi, tetapi sebagai pilihan yang secara sadar dilakukan oleh mereka seperti

melakukan propaganda, merekrut anggota lewat jejaring internet, dan menyebarkan ideologi. Penerapan pendekatan ini terinspirasi dari pemikiran Mahmood yang menjelaskan bagaimana perempuan ISIS menunjukkan hak mereka melalui peran seperti perekrut atau pendukung, meski dalam ideologi ekstrem. Sesuai dengan konteks keterlibatan perempuan dalam ISIS, teori ini membuktikan bahwa perempuan yang bergabung dengan kelompok tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai korban manipulasi.

1.5.2 Terorisme Transnasional

Menurut Yonah alexander dalam (Prabha, 2000) mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan terhadap sasaran sipil yang tidak bersalah untuk mengintimidasi atau menciptakan ketakutan yang meluas dan merata dengan tujuannya yaitu mencapai tujuan politik (Prabha, 2000). Terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan skala transnasional yang sangat mengancam target utamanya. Seringkali yang menjadi korban adalah masyarakat sipil, anak-anak dan lansia (Simanjuntak, 2016).

Terorisme transnasional yaitu tindakan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok non-negara dengan tujuan memengaruhi masyarakat atau pemerintah demi mencapai perubahan politik atau sosial, yang pelaksanaannya dengan cara melintasi batas negara. Artinya, kelompok ini tidak hanya bergerak dan beroperasi di satu negara saja, tetapi memanfaatkan jaringan global, teknologi, serta arus informasi dan mobilitas internasional untuk menyebarkan ideologi dan melakukan aksinya. Karena sifatnya yang lintas batas, dampaknya pun tidak hanya dirasakan oleh satu negara, melainkan dapat memengaruhi keamanan dan stabilitas kawasan bahkan dunia secara lebih luas (Brown, 2017).

Tindak Pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya (Kementrian Pertahanan, 2018). Aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba

dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Terorisme transnasional juga memiliki dimensi gender yang signifikan. Dalam jaringan ISIS, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pengikut pasif, tetapi berperan aktif sebagai perekrut daring, penyebar propaganda, pengelola logistik, penjaga moral (seperti Brigade Al-Khansaa), hingga pelaku aksi kekerasan (Wijaya, 2020). Keterlibatan perempuan lintas negara baik melalui hijrah ideologis, pernikahan transnasional, maupun aktivitas digital menjadikan perempuan sebagai simpul penting dalam keberlanjutan jaringan teroris global. ISIS punya kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap gangguan dari luar. Meski kehilangan wilayah secara fisik, mereka memindahkan basis operasinya ke dunia digital untuk merekrut orang, menggalang dana, dan mengkoordinasikan serangan internasional (Brown, 2017). Di sinilah peran perempuan menjadi krusial. Keterlibatan mereka bukanlah fenomena pinggiran, melainkan kunci utama yang membuat sistem operasional ISIS tetap bertahan meski terus ditekan oleh kekuatan militer global.

Dalam konteks ISIS, agensi perempuan terlihat dari peran mereka sebagai agen aktif dalam propaganda dan rekrutmen, sebagaimana dijelaskan Chatterjee (2016) yang mengklasifikasikan perempuan ISIS sebagai pelaku (bukan hanya korban), dengan fokus pada militansi melalui feminisme Islam versi ekstrem. Pearson & Winterbotham (2017) menemukan bahwa radikalisasi perempuan ke Daesh didorong oleh bagian pencarian identitas dan pemberdayaan, terutama melalui grooming online yang menjanjikan status lebih tinggi dibandingkan diskriminasi Barat, dengan perempuan Eropa mencapai 20% dari pejuang asing.

Terorisme transnasional relevan karena ISIS beroperasi sebagai jaringan transnasional dengan rekrutmen online global, propaganda melintasi benua, dan mobilitas pejuang perempuan dari Indonesia ke Suriah/Irak. Agensi perempuan terintegrasi di sini sebagai aktor aktif dalam jaringan tersebut, misalnya melalui brigade Al-Khansaa atau rekrutmen digital yang menjadikan ISIS contoh terorisme transnasional dengan dimensi gender. Konsep ini juga dinilai relevan karena melihat keterlibatan perempuan dalam jaringan ISIS tidak terpaku hanya dengan satu ruang lingkup saja, melainkan terhubung melalui mobilitas lintas negara, serta aktivitas propaganda digital yang menjangkau berbagai kawasan. Dengan demikian, analisis terhadap agensi perempuan tidak dapat dilepaskan dari karakter transnasional ISIS yang memungkinkan ideologi, rekrutmen, dan koordinasi

berlangsung melampaui batas teritorial negara.

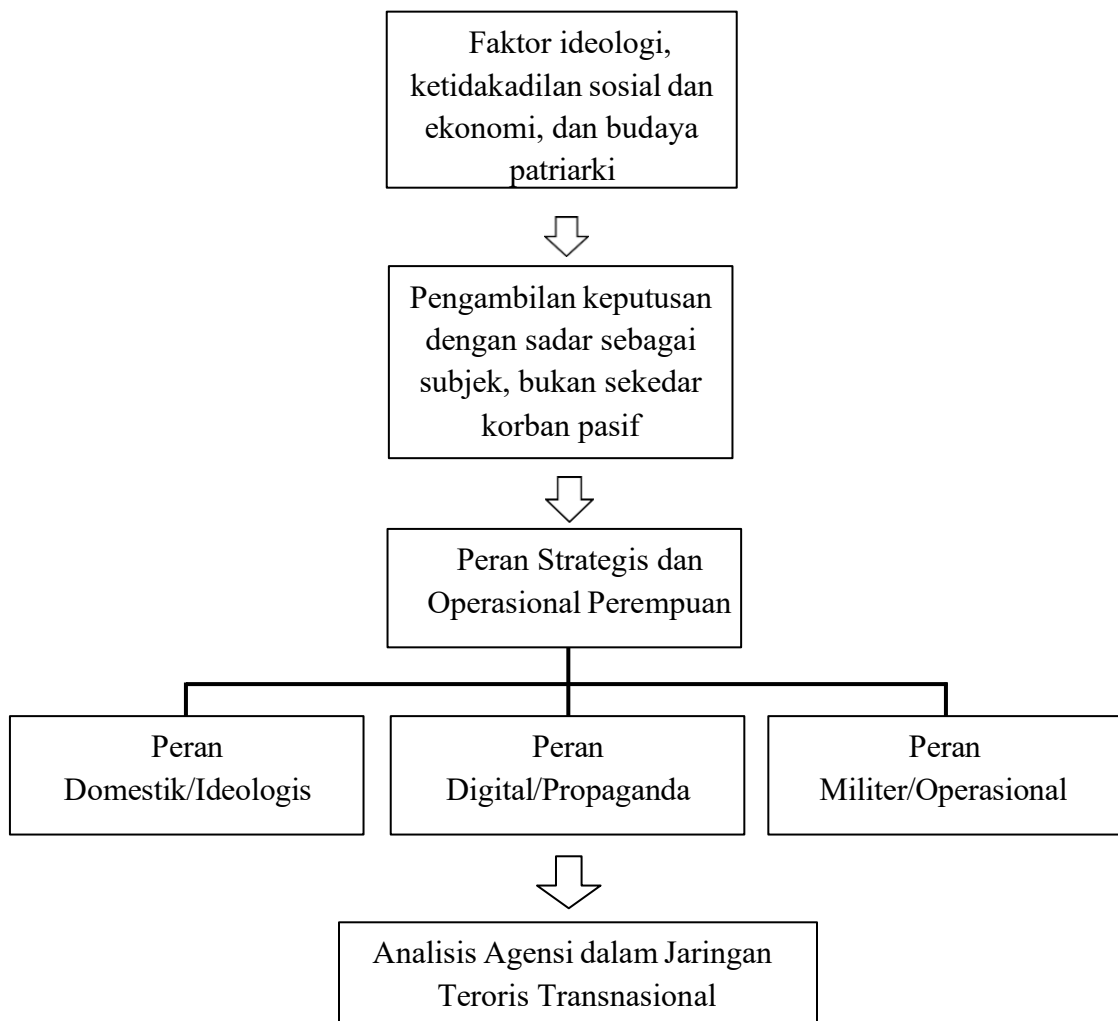
1.6 Asumsi Penelitian

Asumsi dari penelitian ini adalah: “Dinamika interaksi perempuan dalam jaringan terorisme ISIS ditunjukkan melalui partisipasi aktif mereka dalam membangun komunikasi di ruang digital serta keterlibatan mereka dalam mobilitas lintas batas. Agensi tersebut terbentuk melalui pengaruh faktor ideologi, pengalaman pribadi, ketidakadilan sosial, serta perkembangan media digital, seperti Telegram, TikTok, dan X, yang menjadi tempat berkontribusinya perempuan, dalam jaringan terorisme ISIS. Hal tersebut dilakukan melalui keterlibatan aktif dalam propaganda, perekrutan, dan aktivitas operasional jaringan ISIS. Dengan demikian, perempuan tidak hanya dipandang sebagai korban pasif, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kontribusi dalam keberlangsungan jaringan terorisme transnasional.

1.7 Kerangka Analisis

Kerangka analisis ini digunakan sebagai arah penelitian untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana agensi membentuk keterlibatan perempuan dalam jaringan teroris Transnasional ISIS?”. Berdasarkan kerangka analisis tersebut, penulis akan menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam ISIS itu didasari dengan kesadaran penuh. Terjadinya transformasi keterlibatan kelompok perempuan menjadi anggota yang bukan hanya sekedar korban saja disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang dilakukan oleh kaum laki-laki, ketidakadilan sosial yang menjadi latar struktural dan membentuk kerentanan, namun tidak menjadikan perempuan sebagai korban, dan doktrin ideologi khilafah yang dimana perempuan memaknainya sebagai jalan keluar atas kegelisahan dan ketidakadilan global.

Bagan 1. Kerangka Analisis



Melalui agensi dalam feminisme, penulis menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki kapasitas pengambilan keputusan secara sadar. Perempuan tidak diposisikan semata sebagai korban manipulasi atau paksaan, melainkan sebagai aktor yang secara aktif memaknai ideologi ISIS dan memilih untuk terlibat di dalamnya. Agensi tersebut termanifestasi dalam berbagai peran strategis dan operasional perempuan, mulai dari peran domestik dan ideologis, peran digital dan propaganda, hingga peran militer dan operasional. Keseluruhan proses ini dianalisis untuk memahami perempuan sebagai aktor berdaulat dalam jaringan teroris transnasional, serta untuk mengisi kesenjangan penelitian yang selama ini cenderung menempatkan perempuan dalam posisi pasif.

Maka dari itu dengan adanya transformasi perempuan dari korban pasif menjadi subjek yang mengambil keputusan secara sadar, analisis ini akan membuka perspektif baru untuk memahami peran perempuan dalam konteks teroris. Pendekatan feminis dalam agensi menjadikan perempuan sebagai aktor berdaulat yang mampu memilih dan mengoperasikan berbagai peran strategis, mulai dari domestik hingga militer, dalam jaringan teroris. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya yang cenderung memandang perempuan sebagai korban pasif tanpa kapasitas agen aktif.